

**PERAN BNN KABUPATEN BULELENG DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEBAGAI *NON PENAL POLICY* DALAM UPAYA
PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN
BULELENG**

Oleh

Corie Agung Patricia, NIM 2014101100

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng (2) Untuk menganalisis faktor penghambat atau kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di BNN Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Upaya BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika meliputi, Program P2M melalui Sosialisasi, Pembentukan Penggiat atau Relawan Narkotika, Program Rehabilitasi melalui Pembentukan TIM IBM dan Desa Bersinar, serta Kerja Sama Lintas Sektoral. (2) Terdapat kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu kendala internal berupa kendala anggaran, personel/anggota, dan sarana transportasi dan kendala eksternal yaitu kesadaran masyarakat relative rendah dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, *Non Penal Policy*, Penyalahguna Narkotika.

***THE ROLE OF BULELENG DISTRICT NATIONAL NARCOTICS AGENCY
(BNN) IN COMMUNITY EMPOWERMENT AS A NON-PENAL POLICY IN
THE PREVENTIVE EFFORT AGAINST DRUG ABUSE IN BULELENG
DISTRICT***

By

Corie Agung Patricia, NIM 2014101100

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the role of the Buleleng District National Narcotics Agency (BNN) in empowering the community as a non-penal policy in the preventive effort against drug abuse in Buleleng District, and (2) analyze the inhibiting factors or obstacles faced by the Buleleng District BNN in optimizing community empowerment as a non-penal policy in the preventive effort against drug abuse in Buleleng District. The research used empirical legal research, with a descriptive research nature conducted at the Buleleng District BNN. Data collection techniques used were document study, observation, and interviews. Non-Probability Sampling technique was used for sample selection, and Purposive Sampling technique was used for subject determination. Data processing and analysis were conducted qualitatively. The results of the research indicate that; (1) Community Empowerment Programs carried out by the Buleleng District BNN are in accordance with the provisions of the laws and regulations. Buleleng District BNN's efforts in empowering the community as a non-penal policy in the preventive effort against drug abuse include the P2M Program through Socialization, Formation of Narcotics Activists or Volunteers, Rehabilitation Programs through the Formation of IBM Teams and Shining Villages, and Cross-Sectoral Cooperation. (2) There are obstacles in the implementation of community empowerment programs as non-penal policies in the preventive effort against drug abuse in Buleleng District, namely internal obstacles such as budget constraints, personnel/members, and transportation facilities, and external obstacles such as relatively low public awareness in the preventive effort against drug abuse.

Keywords: National Narcotics Agency, Non-Penal Policy, Drug Abuse